



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Mei 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOH. FAISHOL HASANUDDIN
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 65954

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.169.600.000
1. Tanah Seluas 108 m2 di AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
2. Tanah Seluas 162 m2 di AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
3. Tanah Seluas 200 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
4. Tanah Seluas 200 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/120 m2 di AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 74.000.000		
6. Tanah Seluas 300 m2 di MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
7. Tanah dan Bangunan Seluas 618 m2/361 m2 di AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 845.600.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	114.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI MIRAGE MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. MOTOR, HONDA SPACY SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
3. MOTOR, HONDA KHARISMA SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	11.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	69.657.337
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.364.757.337
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.364.757.337

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak



dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 November 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.